BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yaitu dengan saling tolong menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Zakat memegang peranan penting dalam menangani masalah kemiskinan. Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat.¹

Terdapat dua jenis zakat yang wajib untuk ditunaikan oleh umat Islam yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau disebut dengan fitrah dan zakat harta benda (zakat Maal) yang terdiri dari beberapa bagian. Pengeluaran zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter (2,7kg) makanan pokok yang ada di daerah muzakki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya. Sedangkan zakat harta (zakat maal) terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat ternak, zakat tambang, dan zakat rikaz. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta dan benda yang diwajibkan zakatnya.²

Sebagai negara konstitusi zakat memiliki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan

¹Agus Ristanto, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah : Surakarta, 2019).

²Saifullah, *Fiqh Islam* (Darussalam: Ar- Press Raniry, 2019), h. 47.

bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³ Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan implementasi dari peraturan daerah No. 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat di

³Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, 'Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesi', (Zakat dan Wakaf 6, no. 1, 2019), h. 43-44.

⁴Taufikur Rahman, 'Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat', (Muqtasid 6, no.1, 2015), h. 148.

Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki BAZNAS Kab. Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh Institusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru mendapat dukungan penuh untuk memegang peranan penting agar dapat merealisasikan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru. BAZNAS Kabupaten Barru yaitu lembaga yang menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Barru

⁵ Ulfa Auliya Syarif, Staf Bidang Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 20 Agustus 2021.

dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu mustahik untuk mensejahterakan hidupnya.⁶

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan orang yang membayarnya.⁷

BAZNAS Kabupaten Barru adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan hanya di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi, diantaranya sebagai pengumpul zakat, infak, sedekah terbaik nasional dan pengumpulan terbanyak di Sulawesi Selatan. BAZNAS Kabupaten Barru merupakan lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Barru.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Barru, Bapak Abdi selaku Kabid penyaluran & layanan mustahik BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Barru mengumpulkan zakat dari muzakki melalui pemotongan gaji, melalui UPZ, melalui via transfer dan pengumpulan langsung di kantor BAZNAS. Zakat yang

⁶Jumalianti, “ Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis Web pada BAZNAS Kabupaten Barru” (Skripsi Sarjana; Jurusan Sistem Informasi: Makassar, 2018).

⁷ Rahmat Agung Aditya, “Strategi Komunikasi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat secara Online di Perusahaan E-COMMERCE” (Skripsi sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jakarta, 2019).

⁸ <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/kemenag-barru-apresiasi-langkah-BAZNAS-dalam-melidungi-para-honorir> (16 Juni 2021)

dikumpulkan nantinya akan didistribusikan kepada asnaf zakat dan program BAZNAS.⁹

Observasi yang dilakukan terhadap masyarakat muzakki di Jalange mengatakan bahwasanya dia membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Barru melalui UPZ karena muzakki paham tugas BAZNAS adalah mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Barru merupakan satu-satunya lembaga zakat yang ada di Kabupaten Barru dan memiliki jumlah pemasukan zakat terbanyak, tetapi masyarakat muzakki di Jalange belum mengetahui sistem yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusian dan mendayagunaan zakat. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat muzakki di Lingkungan Jalange terkait respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru.

Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi 3 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons masyarakat Jalange terhadap sistem pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana respons masyarakat Jalange terhadap sistem pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Barru ?

⁹Abdi, bidang distriguna & layanan mustahik BAZNAS Kab. Barru, *wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru 15 Februari 2021.

3. Bagaimana respons masyarakat Jalange terhadap sistem pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru ?
- C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mencari dan mengetahui respons masyarakat Jalange terhadap sistem pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Barru
 2. Untuk menganalisis respons masyarakat Jalange terhadap sistem pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Barru
 3. Untuk mengetahui respons masyarakat Jalange terhadap pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru
- D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi peneliti lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf terkait pengelolaan Zakat.
 2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pengelolaan zakat.
 - b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.